

EITI Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Yang Transparan dan Akuntabel

Ronald Tambunan
Sekretariat EITI Indonesia

Disampaikan dalam Acara Workshop Jurnalis dengan tema “Implementasi EITI dan Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia”

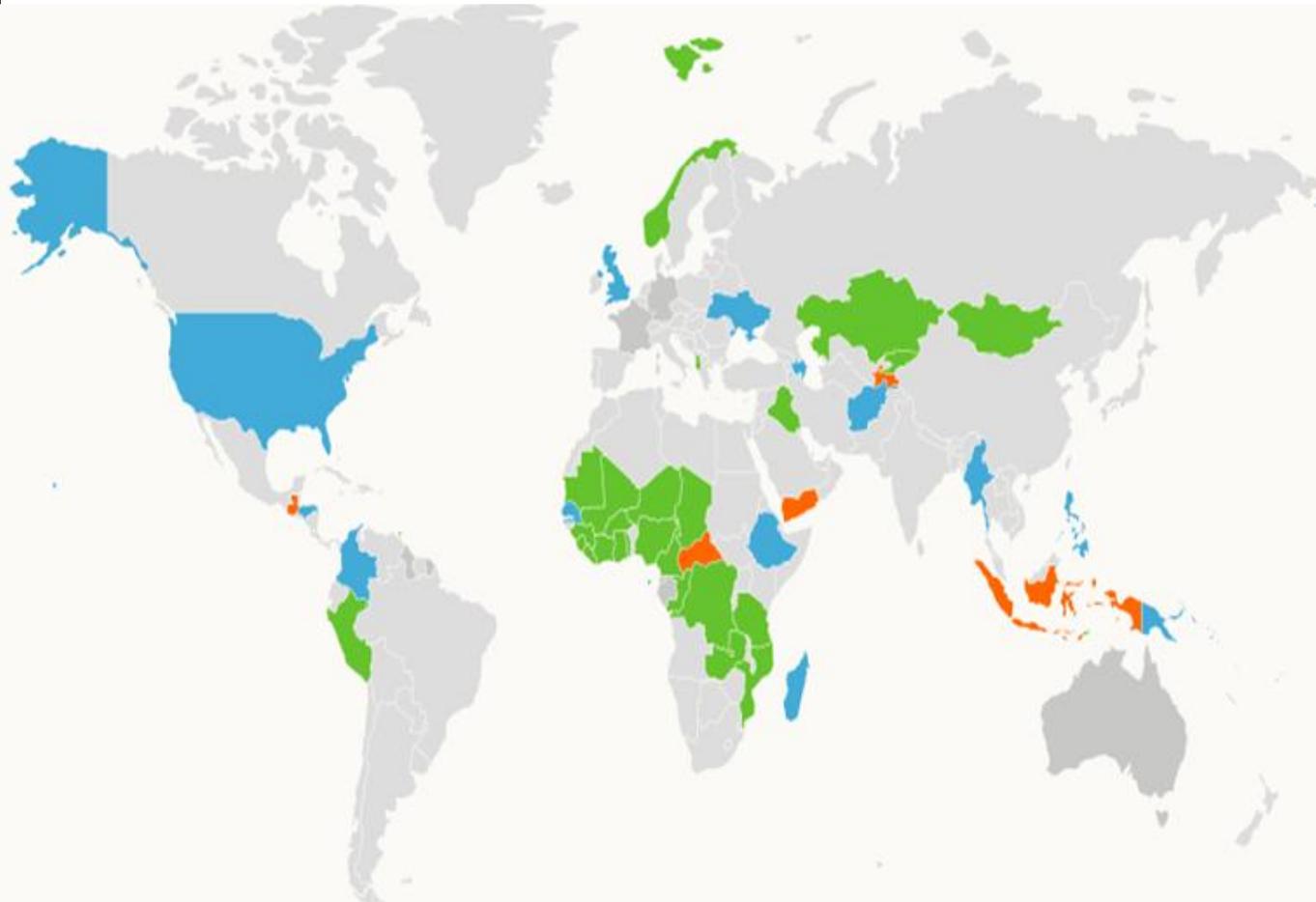
Hotel Novotel, Bogor, 7 September 2015

ronald@eiti.ekon.go.id

<http://eiti.ekon.go.id>

Apa itu EITI ?

- Standar internasional mengenai transparansi penerimaan negara yang bersumber dari industri ekstraktif (migas dan pertambangan) yang diterapkan oleh negara-negara anggota EITI Internasional.
- Prinsip dasar dari standar ini adalah rekonsiliasi laporan dari perusahaan industri ekstraktif dan pemerintah, hasilnya terbuka sebagai informasi publik.



48
IMPLEMENTING
COUNTRIES

31
ARE COMPLIANT WITH
EITI REQUIREMENTS

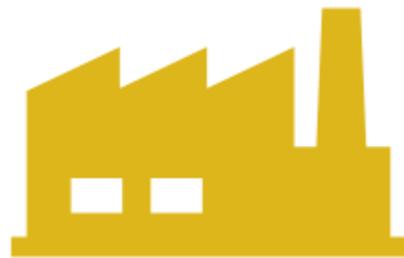
37
COUNTRIES HAVE
PUBLISHED REVENUES

237
YEARS COVERED IN EITI
REPORTS

1.567
TRILLION
USD
GOVERNMENT REVENUES
FROM OIL, GAS AND
MINING

Indonesia negara pertama di ASEAN yang menerapkan EITI diikuti oleh Filipina dan Myanmar

Perusahaan mempublikasi apa dan berapa yang mereka bayar, Pemerintah mempublikasi apa dan berapa yang mereka terima.



PERUSAHAAN

memperlihatkan dan membuktikan pembayaran mereka



LAPORAN EITI

menunjukkan dimana pajak dan royalti diverifikasi dan direkonsiliasi secara independen



PEMERINTAH

memperlihatkan dan membuktikan penerimaan mereka

Seluruh proses dalam implementasi EITI dilakukan dan diawasi oleh anggota tim pelaksana yang terdiri dari Pemerintah, Industri, dan Masyarakat Sipil



Sejarah EITI

1990-an

- Inisiasi oleh kalangan organisasi masyarakat sipil yang mengkampanyekan agar perusahaan ekstraktif mempublikasikan pembayaran yang mereka lakukan kepada pemerintah.
- Inisiatif ini kemudian direspon oleh praktisi pembangunan/organisasi internasional dan akademisi.

2002

- Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, pada KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit for Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan, mencetuskan gagasan EITI.
- Dorongan ini kemudian menjadi suatu gerakan koalisi global yang terdiri dari unsur pemerintah, korporasi, organisasi masyarakat madani (civil society organization), investor serta International Financial Institution seperti World Bank dan IMF.

Sejarah EITI

2003

- Dalam suatu konferensi di London , disetujui prinsip-prinsip EITI dan tahap percobaan (*pilot phase*) EITI diluncurkan.

2005

- Dari hasil pelaksanaan tahap percobaan EITI, dalam suatu pertemuan di Lancaster House, disetujui suatu kriteria EITI. Pertemuan ini sekaligus merupakan rapat pengukuhan dari *International Advisory Group EITI* yang diketuai oleh Peter Eigen dan perwakilan stakeholder EITI

2006

- Pada pertemuan ke-3 EITI Global Conference di Oslo, *Advisory Group* merekomendasikan pembentukan suatu *multi-stakeholder Board (EITI Board)* yang didukung oleh Sekretariat untuk dapat melaksanakan EITI di tingkat internasional.

Dukungan Implementasi EITI



- **Dukungan Korporasi** : 46 perusahaan migas dan pertambangan, antara lain : BHP Billiton, ExxonMobil, BP, Chevron Corporation, ConocoPhillips, Shell, Total, Statoil, Freeport-McMoRan Copper & Gold, Newmont, dll
- **Dukungan Institusi Investasi** : 80 institusi investasi global, antara lain : ABP Investments, Allianz Global Investors, Aviva Investors, Goldman Sachs Asset Management International, HSBC, JP Morgan Asset Management, dll.
- **Dukungan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)** : disampaikan melalui kampanye Publish What You Pay pada tahun 2002, dan didukung oleh lebih dari 300 Organisasi Masyarakat Sipil di seluruh dunia.

Badan-badan EITI Internasional



EITI Conference

Badan pengatur tertinggi EITI atau dikenal dengan *EITI Global Conference* yang diadakan sekali setiap dua tahun.

EITI Board (Dewan EITI Internasional)

Badan pelaksana yang saat ini dikepalai oleh Ms Clare Short. Dewan terdiri dari elemen perwakilan pemerintahan, perusahaan ekstraktif, organisasi masyarakat madani (*civil society organization*), investor serta perwakilan negara-negara yang memberikan dukungan politis terhadap EITI.

International Secretariat

Badan pelaksana dari keputusan yang telah ditetapkan oleh EITI Board serta mengkoordinasikan pengimplementasian EITI secara global. Kantor pusat berada di Oslo Norwegia



Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari **Industri Ekstraktif.**

Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.

Susunan Tim Transparansi

- Tim Pengarah



Susunan Tim Transparansi

- Tim Pelaksana





Laporan EITI Indonesia

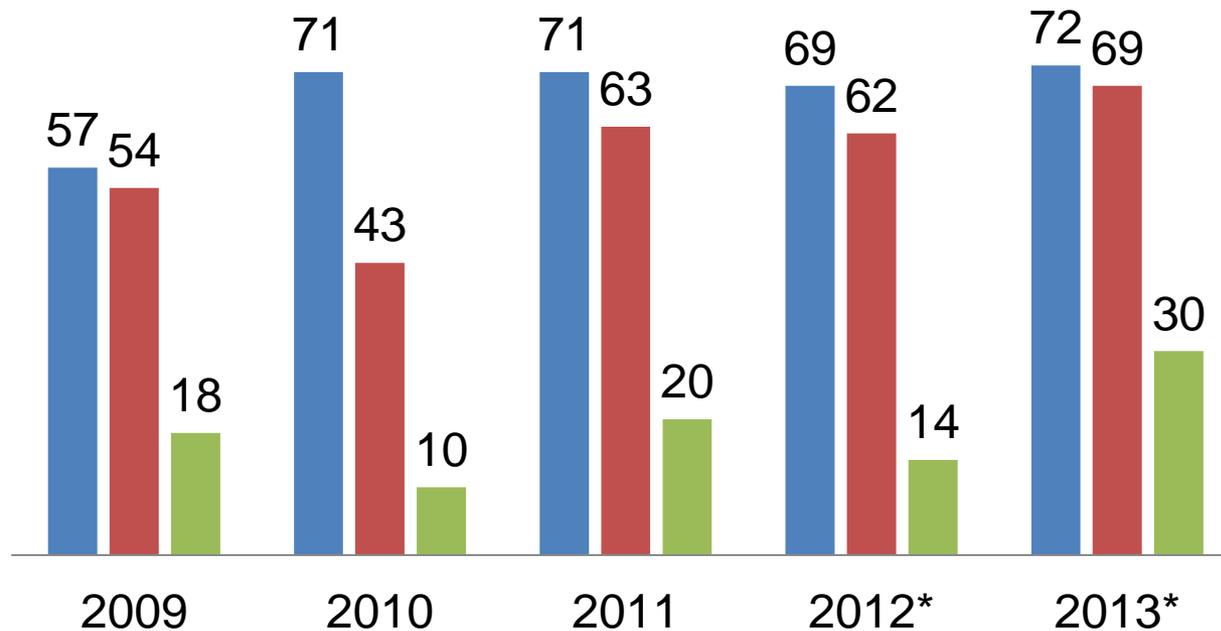


- Laporan I (tahun kalender 2009) terbit dan dipublikasikan pada bulan April 2013.
- Laporan II (tahun kalender 2010 dan 2011) terbit pada bulan April 2014 (untuk sub-sektor migas) dan bulan Juni 2014 (untuk sub-sektor mineral dan batubara).



Total Perusahaan Pelapor

■ Migas ■ Batubara** ■ Mineral**



* Dalam proses, diharapkan terbit pada Oktober 2015

** Walaupun jumlah izin minerba lebih dari 10.000 izin, perusahaan pelapor dalam EITI hanya berjumlah dibawah 100. Hal ini dikarenakan adanya batas ambang yaitu royalti lebih besar dari 25 milyar/tahun. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kontribusi lebih dari 80 % dari total royalti sektor minerba.

Item yang dilaporkan untuk subsektor Minerba

	Rekonsiliasi		Non Rekonsiliasi
1.	Royalti	1.	PPh Pasal 26
2.	PPh Badan	2.	PPh Pasal 4 (2), 15, dan 23
3.	Dividend	3.	PPh Pasal 21
4.	Penjualan Hasil Tambang (Utk PKP2B)	4.	PPN (yang tidak dikreditkan)
5.	Transportation Fee (Utk BUMN)	5.	BM dan BM Tambahan
		6.	Pajak Tidak Langsung Lainnya
		7.	PNBP Kehutanan
		8.	PNBP Lainnya
		9.	Pajak dan Retribusi Daerah
		10.	Penerimaan Daerah Lainnya
		11.	PBB
		12.	Iuran Tetap

Item yang dilaporkan untuk sub-sektor Migas

	Rekonsiliasi		Non Rekonsiliasi
1.	Corporate & Dividend Tax	1.	PPH Pasal 26
2.	Production Bonus	2.	PPH Pasal 4 (2), 15, dan 23
3.	Over/Under Lifting Oil & Gas	3.	PPH Pasal 21
4.	Total Lifting	4.	PPN (yang tidak dikreditkan)
5.	GOI Lifting Oil & Gas	5.	BM dan BM Tambahan
6.	Domestic Market Obligation (DMO)	6.	Pajak Tidak Langsung Lainnya
7.	DMO Fee	7.	PNBP Kehutanan
8.	Signature Bonus	8.	PNBP Lainnya
		9.	Pajak dan Retribusi Daerah
		10.	Penerimaan Daerah Lainnya
		11.	Transportasi (untuk BUMN)

Manfaat Implementasi EITI bagi Indonesia



Pemerintah

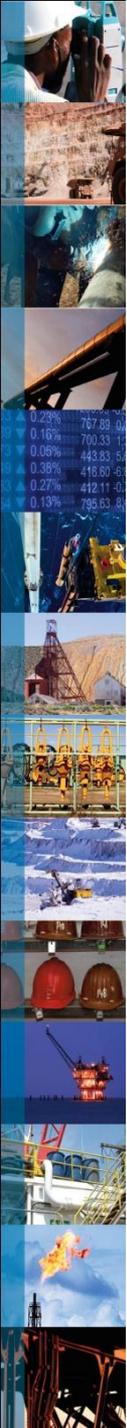
- EITI dapat meningkatkan sistem tata kelola (*good governance*) dan akuntabilitas sektor industri ekstraktifnya;
- Perbaiki iklim investasi , karena EITI dapat meningkatkan prediktabilitas bagi para investor industri ekstraktif- khususnya dalam membantu para investor potensial mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus mereka bayar;
- Pengimplementasian EITI secara sukses dapat dilihat sebagai peluang Indonesia untuk mengakses dana dari lembaga-lembaga donor seperti World Bank, IFC dan ADB dimana lembaga-lembaga donor tersebut sekarang mulai menuntut negara-negara untuk mendukung EITI sebagai syarat untuk memperoleh dana pinjaman sektor energi dan pertambangan.

Perusahaan

Pengimplementasian EITI akan mengurangi tekanan pada industri ekstraktif, karena publik dapat melihat secara langsung apa yang telah dilakukan oleh perusahaan dan kemudian dapat memberikan penilaiannya secara adil.

Masyarakat

Tersedia informasi dan data mengenai pendapatan Negara/Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.



Terima
kasih